## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan Agency Theory yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut agents) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Mereka, para tenaga profesional, bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Sehingga dalam hal ini pera profesional tersebut berperan sebagai agent-nya para pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba, semakin besar pula keuntungan yang didapatkan agents. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan.

Namun pada sisi lain pemisahan seperti ini memiliki segi negatifnya. Adanya keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Lebih lanjut pemisahan ini dapat pula menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada, misalnya antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas.

Der.gan adanya sisi negatif ini, timbul konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Konflik ini dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut dengan menggunakan good corporate governance. La Porta et al (1999) dàlam Sylvia dan Yanivi, (2004) mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat mekanisme yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Agency Theory (teori keagenan) memberikan kesan bahwa insider perusahaan cenderung untuk mengambil alih perusahaan dengan memaksimalkan kepentingannya sendiri. Namun dengan munculnya mekanisme pengawasan tersebut akan menimbulkan biaya yang disebut sebagai agency cost.

Merurut teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) dalam Wahidahwati 1
(2002) dinyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. Hal ini diperkuat dengan penelitian Morris (1987) dalam Eddy dan Mas'ud (2003) yang menjelaskan bahwa manipulasi dari nilai perusahaan diasumsikan bertujuan memaksimumkan keuntungan dapat menimbulkan biaya keagenan (agency cost).

Penyebab konflik antara manajer dengan pemegang saham diantaranya adalah pembuatan keputusan yang berkaitan dengan (1) Aktivitas pencarian dana (financing decision) dan (2) Pembuatan keputusan yang berkaitan dengan bagaimana dana yang diperoleh tersebut diinvestasikan. La Porta dkk (2000) dalam Deni dan Rika (2004) telah membuktikan bahwa di beberapa negara ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer dan para pemegang saham pengendalian (controlling shareholders) terhadap para pemegang saham minoritas dan para kreditor sangat besar.

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan ini dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (alignmet) berbagai kepentingan tersebut. Pertama, menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Wahidahwati (2002) adalah dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (managerial ownership), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Kedua, kepemilikan saham oleh investor institusional. Moh'd et al, (1998) dalam Wahidahwati (2002) menyatakan bahwa
investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar. Selain itu, Bushee (1998) dalam Pratana dan Mas'ud (2003) mengatakan investor institusional dianggap sebagai sophisticated investors yang tidak dengan mudah bisa "dibodohi" oleh tindakan manajer. Dan ketiga, melalui peran monitoring oleh dewan komisaris (board of directors). Beberapa penelitian empiris yang dilakukan oleh Dechow et al (1996), dan Beasley (1996), dalam Pratana dan Mas'ud (2003), telah menemukan hubungan yang signifikan antara peran dewan komisaris dengan pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitoring proses pelaporan keuangan.

Rajgofal et al (1999) dalam Pratana dan Mas'ud (2003) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional mampu menjadi konstrain bagi perilaku manajemen laba setelah mereka menemukan adanya hubungan negatif antara nilai absolut dar! discretionary accruals, sebagai proksi untuk manajemen laba, dengan tingkat kepemilikan institusional. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Pratana dan Mas'ud (2003) istilah struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel yang penting di dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah hutang dan equity tetapi juga oleh prosentase kepemilikan oleh manager dan institusional.

Hasil penelitiun Pratana dan Mas'ud (2003) menjelaskan bahwa mekanisme kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran atau jumlah dewan komisaris mampu mengurangi konflik kepentingan yang timbul dari hubungan
keagenan antara manajemen dengan pemegang saham (shareholders), dan kepemilikan manajerial dan institusional berhasil menjadi mekanisme yang mengontrol dan meminimalkan perilaku manipulasi laba oleh manajer sehingga kualitas laba yang dilaporkan dapat meningkat. Sedangkan untuk ukuran dewan komisaris hasilnya kontradiktif dengan hasil pegujian hipotesis yang menghub ıngkan ukuran dewan komisaris dengan manajemen laba. Hasil ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Faizal (2004) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional belum dapat berfungsi sepenuhnya sebagai mekanisme untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan aktiva perusahaan dan belum dapat menekan diskresi manajerial dan belum efektif sebagai alat untuk memonitor manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan asset turnover dan pengurangan beban operasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul skripsi "ANALISIS PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA".

## B. BATASAN MASALAH

Mekanisme corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga variabel yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris independen.

## C. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba?
3. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajumen laba?

## D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh mekanisme corporate governance (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris independen) terhadap aktivitas manajemen laba.

## E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memierikan bukti secara empirik tentang adanya pengaruh mekanisme corporate governance yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba.
2. Bagi kalangan akademis maupun para peneliti yang berminat terhadap studi corporate governance dan manajemen laba, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.
